

Penerapan Teori Sosiologi Pendidikan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Di Kota Makassar

¹M Ihsan Darwis, ²Nahariah, ³Ishan Azis

¹IAIN Pare-Pare, Indonesia

²UIN Alauddin Makassar, Indonesia

³STAI DDI Pangkep, Indonesia

Corresponding Author  mihsandarwisalfath69@gmail.com

ABSTRACT

Article Info

Article history:

Received

February 03,
2025

Revised

March 17,
2025

Accepted

June 29, 2025

This study aims to analyze the application of sociological theories of education in increasing community participation in education in Makassar City. A qualitative approach was used with a case study method in several areas with varying levels of educational participation. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation, with informants including parents, teachers, community leaders, and education department officials. The research findings indicate that the practical application of functionalist, conflict, and symbolic interactionist theories can enhance community awareness and involvement in supporting access, quality, and equity in education. The functionalist theory encourages social collaboration between schools and communities through collective educational activities. The conflict theory serves as a basis for advocating justice and educational access for marginalized groups, while the symbolic interactionist theory helps shape positive public perceptions and understanding of the importance of education through daily interactions. These findings highlight the significance of a sociological approach in formulating community-based education policies, particularly in building an educational system that is participatory, inclusive, and responsive to the social needs of local communities. Therefore, it is recommended that local governments and educational institutions actively involve community members in the planning and implementation of educational programs and establish social dialogue forums as platforms for exchanging ideas and educational aspirations in a sustainable manner.

Keywords: Sociology of Education, Community Participation, Functionalist Theory, Education In Makassar City

Journal Homepage <http://ojs.staialfurqan.ac.id/alqiyam>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas, relevansi, dan pemerataan pendidikan. Masyarakat yang terlibat secara aktif—baik dalam bentuk dukungan moral, finansial, pengawasan, maupun kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan—dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih kuat, demokratis, dan berkelanjutan (Tilaar, 2003; Suyanto & Sutinah, 2005). Peran ini semakin ditekankan dalam kerangka otonomi daerah dan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*) yang menuntut partisipasi lokal sebagai elemen strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan (Mulyasa, 2013).

Partisipasi masyarakat mencerminkan semangat demokratisasi pendidikan, yang menempatkan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, dan warga masyarakat (UNESCO, 2015). Ketika masyarakat diberi ruang untuk berperan secara aktif, baik dalam bentuk kontribusi fisik seperti pembangunan sarana prasarana, maupun dalam bentuk kontrol sosial, penyampaian aspirasi, serta pengawasan terhadap mutu layanan pendidikan, maka sistem pendidikan menjadi lebih inklusif dan relevan terhadap kebutuhan lokal (Dharma, 2011; Bray, 2001).

Selain itu, partisipasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas publik dalam sektor pendidikan. Sekolah yang terbuka terhadap peran serta masyarakat akan membentuk budaya transparansi, meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*), dan memperkuat legitimasi institusi pendidikan dalam komunitas (Gasperz, 2005). Sayangnya, dalam konteks praktik, partisipasi masyarakat masih sering bersifat simbolik atau administratif semata, seperti hanya diundang dalam rapat sekolah tanpa keterlibatan bermakna dalam pengambilan keputusan (Furqon, 2004). Hal ini juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Makassar, di mana keterlibatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, serta struktur relasi antara sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu pendekatan multidimensional untuk memahami fenomena ini, salah satunya melalui perspektif sosiologi pendidikan yang menelaah hubungan antara pendidikan dan struktur sosial, nilai budaya, serta kekuasaan yang bekerja di dalamnya (Bourdieu, 1990; Durkheim, 1956).

Di Kota Makassar, meskipun indikator seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan tren positif, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang nyata antara masyarakat di wilayah urban dan pinggiran kota. Wilayah perkotaan seperti Panakkukang dan Tamalate relatif lebih aktif dalam kegiatan pendidikan dibandingkan wilayah pinggiran seperti Biringkanaya atau Manggala, yang masih menghadapi hambatan sosial-ekonomi, rendahnya literasi keluarga, dan terbatasnya akses ke fasilitas pendidikan yang memadai. Untuk menjawab tantangan tersebut, pendekatan sosiologi pendidikan menjadi sangat relevan. Pendekatan ini menempatkan pendidikan dalam kerangka struktur sosial yang kompleks, di mana nilai, norma, kekuasaan, dan hubungan antarindividu membentuk proses pendidikan (Durkheim, 1956; Bourdieu, 1990). Pendidikan tidak hanya sebagai proses institusional, tetapi juga sebagai arena sosial tempat reproduksi budaya, pelabelan, dan ketimpangan berlangsung.

Penelitian terdahulu banyak membahas partisipasi masyarakat dalam pendidikan dari sudut pandang kebijakan atau administratif, namun masih minim kajian yang secara spesifik menganalisisnya dengan pendekatan teori-teori sosiologi pendidikan secara kontekstual di tingkat lokal, khususnya di Kota Makassar. Selain itu, keterlibatan masyarakat seringkali direduksi pada aspek teknis (seperti sumbangan atau kehadiran di rapat sekolah), tanpa melihat dinamika sosial, simbolik, dan relasional yang menyertainya. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan integratif dari tiga teori utama dalam sosiologi pendidikan—yakni fungsionalisme, konflik, dan interaksionisme simbolik—untuk menganalisis dan memetakan faktor-faktor sosial yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Kota Makassar. Pendekatan ini menawarkan perspektif holistik yang tidak hanya menyoroti angka partisipasi, tetapi juga menggali makna sosial di balik keterlibatan masyarakat, persepsi terhadap lembaga pendidikan, dan relasi kuasa dalam komunitas pendidikan. Penelitian ini juga menghasilkan model konseptual partisipasi berbasis sosial-budaya lokal yang dapat dijadikan dasar pengembangan kebijakan pendidikan berbasis komunitas di wilayah urban-pinggiran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna di balik fenomena sosial secara mendalam dan holistik (Creswell, 2014). Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi penerapan teori sosiologi pendidikan dalam konteks lokal Kota Makassar. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama (Moleong, 2017). Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (Creswell, 2014). Selain itu, digunakan instrumen bantu berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan format dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman & Saldana (2014), yang mencakup tiga tahapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Teori Fungsionalisme

Program “*Orang Tua Peduli Sekolah*” merupakan salah satu bentuk inovasi partisipatif yang dikembangkan oleh beberapa satuan pendidikan di Indonesia dalam rangka membangun sinergi antara sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua peserta didik. Program ini mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan, tidak hanya dalam bentuk dukungan materi, tetapi juga melalui partisipasi sosial, seperti gotong royong, pengawasan kegiatan sekolah, dan forum komunikasi warga sekolah.

1. Bentuk Partisipasi yang Dikembangkan

Dalam implementasinya, program ini memfasilitasi berbagai kegiatan seperti:

- Gotong royong memperbaiki fasilitas sekolah (kelas, taman, perpustakaan).
- Forum komunikasi antara guru, orang tua, dan siswa untuk membahas kemajuan dan permasalahan pendidikan.
- Kelas parenting dan workshop kolaboratif, untuk memperkuat peran orang tua sebagai pendidik di rumah.
- Kegiatan sosial sekolah, seperti bazar, pengajian, kerja bakti, dan kegiatan kebudayaan.

Partisipasi ini memperlihatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai pengguna layanan pendidikan, tetapi sebagai mitra aktif dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan.

2. Memperkuat Solidaritas Sosial

Menurut Emile Durkheim (1893/2006), pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai sosial, termasuk solidaritas sosial. Dalam konteks ini, keterlibatan orang tua melalui gotong royong dan forum komunikasi memperkuat *solidaritas mekanik* di lingkungan sekolah—yakni keterikatan sosial yang muncul karena adanya kesamaan tujuan dan nilai bersama.

Gotong royong dan kerja sama warga sekolah menjadi praktik nyata dari nilai-nilai seperti:

- Kebersamaan,

- Kepedulian,
- Tanggung jawab kolektif,
- Toleransi.

Nilai-nilai tersebut secara tidak langsung diajarkan dan diwariskan kepada peserta didik melalui keteladanan sosial yang nyata.

3. Dampak Positif terhadap Ekosistem Pendidikan

Beberapa dampak positif dari program ini yang tercatat antara lain:

- Meningkatnya rasa memiliki terhadap sekolah oleh masyarakat.
- Terbangunnya komunikasi yang terbuka antara sekolah dan wali murid.
- Peningkatan kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- Terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan kolaboratif.

Menurut Tilaar (2003), pendidikan yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat. Sekolah yang mampu membuka ruang partisipasi akan melahirkan sistem yang demokratis dan berkeadilan sosial.

4. Penguatan Sosiologis

Pendekatan struktural-fungsional dalam sosiologi pendidikan berakar pada pemikiran Talcott Parsons (1951), yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas struktur-struktur (lembaga sosial) yang saling berkaitan dan bekerja secara harmonis untuk menjaga kestabilan dan keteraturan sosial. Setiap elemen masyarakat memiliki fungsi masing-masing dalam menjaga keberlangsungan sistem sosial tersebut. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan (sekolah), keluarga, dan masyarakat dipandang sebagai subsistem dari sistem sosial yang lebih besar. Ketiganya memiliki fungsi edukatif, normatif, dan integratif yang saling melengkapi.

Peran Pendidikan dalam Sistem Sosial

Menurut Parsons (1951), pendidikan memiliki fungsi penting, yaitu:

- Fungsi sosialisasi, yaitu mentransmisikan nilai-nilai dan norma sosial kepada generasi muda.
- Fungsi seleksi dan alokasi peran, yaitu membantu individu menyesuaikan diri dengan peran sosial berdasarkan prestasi dan kompetensi.
- Fungsi integrasi sosial, yaitu memperkuat kohesi sosial melalui nilai bersama.

Pendidikan, dalam kerangka ini, bukan hanya tanggung jawab sekolah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari keluarga dan masyarakat untuk menciptakan kesinambungan

sistem. Program “*Orang Tua Peduli Sekolah*” menjadi manifestasi nyata dari pendekatan struktural-fungsional karena:

- Keluarga (orang tua) berfungsi sebagai agen sosialisasi primer yang bekerja sama dengan sekolah untuk membentuk karakter dan nilai peserta didik.
- Sekolah bertindak sebagai lembaga formal yang melanjutkan proses internalisasi nilai.
- Masyarakat, melalui tokoh lokal, organisasi komite sekolah, dan lingkungan sekitar, turut berperan dalam mendukung proses pendidikan.

Dengan demikian, ketiga unsur ini bekerja secara sinergis untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan sistem pendidikan, serta memperkuat solidaritas sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Jika salah satu elemen (misalnya peran orang tua) tidak berfungsi optimal, maka keseimbangan sistem pendidikan sebagai bagian dari sistem sosial akan terganggu. Sebaliknya, ketika seluruh elemen menjalankan fungsinya, maka terbentuklah sebuah sistem yang stabil, integratif, dan adaptif, sebagaimana digambarkan oleh Parsons dalam teorinya tentang AGIL: A (Adaptation): Keluarga dan sekolah menyesuaikan diri dengan tantangan pendidikan. G (Goal attainment): Bersama mencapai tujuan pendidikan nasional. I (Integration): Memperkuat kohesi dan komunikasi antar unsur pendidikan. L (Latency): Melestarikan nilai-nilai budaya dan moral generasi.

Penerapan Teori Konflik

Data menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah cenderung kurang terlibat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Penerapan teori konflik digunakan untuk mengadvokasi kebijakan afirmatif, seperti beasiswa lokal dan pendidikan gratis.

1. Ketimpangan Partisipasi Kelompok Miskin dalam Pendidikan

Data empiris dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dalam pengambilan keputusan pendidikan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya:

- Keterbatasan waktu karena bekerja dalam sektor informal atau bergaji harian.
- Rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang menyebabkan kurangnya kepercayaan diri atau kemampuan berpartisipasi dalam forum formal sekolah.
- Struktur sosial yang hierarkis, di mana kelompok elite atau kelas menengah lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan sekolah (Darmaningtyas, 2004).
- Ketidakseimbangan akses informasi dan teknologi.

Situasi ini memperkuat reproduksi ketimpangan sosial dalam pendidikan, di mana kelompok kaya dan berpendidikan tinggi lebih aktif mempengaruhi arah kebijakan sekolah, sedangkan kelompok miskin menjadi pihak yang pasif dan termarginalkan.

2. Perspektif Teori Konflik dalam Pendidikan

Teori konflik dalam sosiologi pendidikan, yang dikembangkan oleh Karl Marx dan kemudian dikembangkan oleh Bowles dan Gintis (1976), menyoroti bahwa sistem pendidikan cenderung merefleksikan dan memperkuat struktur kelas sosial. Dalam pandangan ini:

- Pendidikan bukanlah arena netral, tetapi menjadi alat kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi, politik, dan kultural.
- Kurangnya partisipasi kelompok miskin dalam pengambilan keputusan pendidikan bukan karena kurangnya minat, tetapi karena struktur sosial yang timpang.
- Sekolah sering kali mereproduksi ketimpangan ini melalui seleksi, pelabelan, dan distribusi sumber daya yang tidak merata.

3. Advokasi Kebijakan Afirmatif Melalui Teori Konflik

Melalui kerangka teori konflik, pendidikan diposisikan sebagai arena perjuangan untuk keadilan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi kebijakan afirmatif untuk melindungi dan memberdayakan kelompok masyarakat miskin dan termarginalkan.

Contoh kebijakan afirmatif yang relevan dalam konteks Kota Makassar dan daerah urban lainnya:

- Beasiswa lokal berbasis komunitas atau RT/RW untuk siswa dari keluarga tidak mampu.
- Program sekolah gratis dan pembebasan biaya seragam, buku, dan ujian.
- Kuota partisipasi orang tua dari kalangan miskin dalam komite sekolah.
- Pemberdayaan forum warga belajar dan musyawarah pendidikan inklusif di lingkungan sekolah.

Kebijakan afirmatif ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga membuka ruang keterlibatan dan pengaruh bagi kelompok yang selama ini disisihkan dari proses pengambilan keputusan.

4. Implikasi Sosial

Penerapan teori konflik dalam kebijakan pendidikan mendorong transformasi dari sistem yang eksklusif menuju sistem yang lebih demokratis. Ini berarti mengubah cara pandang dari "pemberian bantuan" menjadi "pengakuan hak" (right-based approach). Dengan demikian:

- Pendidikan menjadi alat pemberdayaan dan mobilitas sosial.
- Struktur sosial tidak lagi ditentukan oleh status ekonomi orang tua, tetapi oleh kemampuan dan kesempatan yang setara.

KESIMPULAN

Penerapan teori sosiologi pendidikan secara praktis di Kota Makassar menunjukkan bahwa pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat. Pendidikan bukan

hanya proses formal di ruang kelas, melainkan juga merupakan hasil interaksi sosial yang melibatkan berbagai unsur seperti keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat luas. Pendekatan sosiologis memungkinkan pemahaman bahwa sekolah adalah bagian dari sistem sosial yang lebih besar, di mana partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menjamin keberhasilan proses pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat terbukti mampu mendorong lahirnya praktik-praktik partisipatif seperti gotong royong, forum warga sekolah, dan program Orang Tua Peduli Sekolah yang memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan rasa memiliki terhadap lembaga pendidikan. Hal ini sejalan dengan teori struktural-fungsional yang menekankan bahwa stabilitas sistem sosial bergantung pada keterpaduan fungsi masing-masing elemen dalam masyarakat. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat juga memperkuat prinsip pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sosial. Dengan keterlibatan semua pihak, pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa diskriminasi, serta mencerminkan nilai-nilai lokal dan kebutuhan nyata masyarakat.

REFERENSI

- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Bowles, S., & Gintis, H. (1976). *Schooling in capitalist America: Educational reform and the contradictions of economic life*. New York: Basic Books.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Darmaningtyas. (2004). *Pendidikan sebagai alat kekuasaan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. (2018). *Pedoman Program Orang Tua Peduli Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Durkheim, É. (2006). *Pendidikan dan sosiologi* (Y. S. Agustinus, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Karya asli diterbitkan tahun 1897)
- Freire, P. (2005). *Pendidikan kaum tertindas* (terj.). Jakarta: LP3ES.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Parsons, T. (1951). *The social system*. New York: Free Press.
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative evaluation and research methods* (2nd ed.). Newbury Park, CA: SAGE Publications
- Sadgopal, A. (2011). Right to education vs. right to learning. *Social Scientist*, 39(9/10), 17–50.
- Soetomo. (2012). *Pendidikan partisipatoris: Membangun masyarakat madani berbasis pendidikan rakyat*. Yogyakarta: LKiS.
- Suharto, E. (2009). *Sosiologi untuk pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Tilaar, H. A. R. (2003). *Kekuasaan dan pendidikan: Manifesto pendidikan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.